



# Buletin Parlementaria

Nomor 1060/II/VII/2019 • Juli 2019

# 4<sup>TH</sup>

MENUJU  
INDONESIA  
UNGGUL

## Baleg Setujui RUU Penanggulangan Bencana Jadi Usul Inisiatif DPR



9 772614 339005



**3** Pemerintah Harus  
Siapkan Langkah Baru  
Atur Tarif Tiket Pesawat



**10** Komisi IV Apresiasi  
Program SERASI di  
Banyuasin

# Baleg Setujui RUU Penanggulangan Bencana Jadi Usul Inisiatif DPR



Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI usai penandatanganan RUU Penanggulangan Bencana jadi Usul Inisiatif DPR. Foto: Arief/OD

**R**apat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana menjadi usul inisiatif DPR RI.

Persetujuan dicapai setelah perwakilan sepuluh fraksi di Baleg melakukan harmonisasi naskah RUU dilanjutkan penyampaian dukungannya atas penyusunan RUU tersebut, di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (2/7).

Selaku Ketua Panitia Kerja (Panja), Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto menyampaikan RUU Penanggulangan Bencana sebagai pengganti Undang-

Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 akan mengatur pola kordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana, sehingga diharapkan tidak ada lagi penanganan bencana yang masih bersifat sektoral dan terfragmentasi.

“Yang terpenting dari RUU ini adalah mencerminkan adanya pelayanan negara yang lebih sigap terhadap masyarakat. Jadi RUU ini mengharuskan kepada pemerintah atau badan penanggulangan nasional daerah untuk menetapkan status bencana selambatnya 3 x 24 jam,” jelas Totok.

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, pemerintah daerah maupun pusat berhak melakukan penetapan status

darurat bencana. Kendati demikian, status bencana dapat diubah mengikuti kebutuhan dan kategorinya.

“Misalnya, status bencana daerah nanti bisa diubah dengan tingkatan yang lebih tinggi jika terjadi eskalasi menjadi bencana nasional. Yang penting dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari, pemerintah harus menetapkan status bencana,” sambungnya.

Selain itu, Panja juga mendorong pengalokasian anggaran dalam bentuk dana siap pakai untuk penanggulangan bencana paling sedikit 0,5 persen dari APBN atau APBD. “Artinya, dana itu terus ada di kas negara maupun pemerintah daerah,” tandas Totok. ■ ann/es

# Pemerintah Harus Siapkan Langkah Baru Atur Tarif Tiket Pesawat

**W**akil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Agus Hermanto menilai, pemerintah harus siap untuk memikirkan langkah baru guna mengatur tarif tiket penerbangan pesawat yang belakangan ini terus menjadi polemik yang tak kunjung usai. Ia meminta agar pemerintah dan *stakeholder* industri penerbangan tetap kondusif dan terus berkoordinasi hingga keadaan stabil.

Usai menerima kunjungan mahasiswa AMIK Bekasi di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/7), Agus menginginkan ada keseimbangan antara bisnis industri penerbangan dengan para konsumen pengguna jasa penerbangan. Menurutnya pemerintah harus menyiapkan *grand design* untuk menyelesaikan dua prioritas tersebut.

“Pemerintah saya kira juga memiliki (tarif) batas atas dan batas bawah. Batasan inilah yang harus dikoordinasikan, karena kita tentunya tidak ingin BUMN juga merugi. Tetapi kita juga harus memberi keberpihakan

bahwa tarif tiket juga tidak boleh terlalu mahal. Ya inilah yang harus dikoordinasikan. Kemarin sudah ada kesepakatan-kesepakatan, namun tetap harus diperhatikan tema besarnya,” analisa Agus.

Di sisi lain, politisi Partai Demokrat itu mengapresiasi kinerja pemerintah yang tanggap menciptakan beberapa kesepakatan untuk memberi diskon sejumlah biaya operasional maskapai di tanah air dalam rapat koordinasi dengan *stakeholder*. Namun ia tetap mendorong pemerintah untuk menentukan sikap terkait langkah selanjutnya.

“Namun karena ini tahap penyesuaian, maka harus tetap dikoordinasikan, dan pemerintah juga tidak boleh bosan-bosannya mengingatkan para *stakeholder* karena bisnis penerbangan harus jalan, tetapi tarif tiket tentunya harus sesuai. Selanjutnya pemerintah harus didorong membentuk *grand theory* yang dapat mengatur keseimbangan industri penerbangan termasuk tarif tiket ini,” tukas Agus.

■ er/sf



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Agus Hermanto. Foto: Arief/OD



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI  
**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)  
**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)  
**PIMPINAN PELAKSANA**  
Y.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)  
**W.K PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)  
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

**REDAKTUR**  
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

**REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Guntur Dewanto, Hasri Mentari

**ANGGOTA REDAKSI**  
Agung Sulistono, S.H., Rizka Arinindya, S.Sos., Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullil, Purntho Pranowo, Singih Kinanti Rimban, Siti Nadiah, Rihan Hidayat, Nafisa Hanum Alayudrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

**FOTOGRAFER**  
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah  
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,  
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah,  
Geraldji Opie.

**ANALIS MEDIA**  
Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya,  
Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,  
Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

## PENERBITAN

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**FOTOGRAFER ART**  
Friederick Munchen

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito

**STAF PRODUKSI**  
Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

**ADMINISTRASI**  
**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Arif, Lamin, Yuliana Puspita  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO**  
**DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

# Wartawan Harus Jadi Pemersatu, Bukan Pemecah Belah

**K**etua DPR RI Bambang Soesatyo meminta agar para wartawan ikut andil dalam menjaga persatuan dan kesatuan, serta kondusifitas bangsa. Sebagai jurnalis yang berpihak kepada kepentingan publik, wartawan juga harus mampu mencerdaskan masyarakat melalui berita informasi yang disajikan.

“Jangan hanya terjebak adigium bahwa *bad news is good news*, sehingga lebih sering mementingkan bombastis ketimbang nilai sebuah berita. Apalagi sampai menyebarkan berita bohong atau hoax. Wartawan harus menjadi pemersatu, bukan pemecah belah,” kata Bamsuet saat menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia DKI Jakarta (PWI Jaya) periode 2019-2024, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (02/7).

Sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia jurnalistik, Bamsuet memahami betul bagaimana beratnya tugas yang diemban seorang wartawan saat berburu berita di lapangan. Panas, terik, hujan, angin, serta berbagai kondisi selalu datang silih berganti. Belum lagi ditambah tekanan dari meja redaksi agar bisa cepat melaporkan berbagai kejadian secara akurat.

“Karena tugas di lapangan sudah berat, sebagai sesama wartawan harus saling tolong menolong. Jangan malah saling menjatuhkan satu sama lain. Melalui PWI Jaya, kawan-kawan wartawan bisa saling bersinergi dan bertukar informasi. Sekaligus memperluas jaringan. Keunggulan lain dari profesi wartawan adalah jaringannya yang tanpa batasan,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Ia juga menyampaikan, para wartawan tidak perlu berkecil hati dalam menekuni profesinya sebagai jurnalis. “Dari wartawan bisa berkembang menjadi pemilik media, mengingat di era digital seperti saat ini memiliki media tidak sesulit seperti di masa lampau. Atau bisa juga menjadi pengusaha, konsultan *branding*, maupun digital *agency*, *advertising*. Bahkan tak menutup kemungkinan menjadi politisi, menteri, presiden, wakil presiden, maupun ketua umum partai politik,” ucap Bamsuet.

Bamsuet menuturkan, amanah yang saat ini diembannya sebagai Ketua DPR RI juga berkat profesinya di masa lampau sebagai wartawan. Dengan menjadi wartawan, kemampuan menulis, berbicara dan berdialogika bisa berkembang, sehingga bisa menganalisis kejadian dengan tepat.

“Jujur saat ini masih ada satu cita-cita saya yang belum tercapai. Kalau karir politik di DPR, saya sudah mencapai posisi tertinggi sebagai Ketua DPR. Walaupun awalnya saya hanya berkeinginan menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI. Nah, sebagai wartawan cita-cita saya yang belum terwujud adalah menjadi Ketua PWI,” canda Bamsuet yang disambut tawa hadirin. ■ dep/es



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menghadiri pelantikan pengurus PWI DKI Jakarta. Foto: Oji/OD

# Penduduk Bantaran Sungai Kahayan **Harus Ditata**



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron memimpin Tim Kunspek Komisi II DPR RI meninjau Sungai Kahayan, Palangka Raya. Foto: Azka/OD

**T**im Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI meninjau penduduk yang tinggal di sepadan atau bantaran Sungai Kahayan, di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengatakan, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), disebutkan bahwa sepadan atau bantaran sungai sejauh 100 meter dari garis pasangnyanya air sungai.

“Mereka membuat rumah di atas sungai, sehingga ini harus ditata,” kata Herman di sela-sela memimpin Tim Kunspek Komisi II DPR RI meninjau bantaran Sungai Kahayan, Palangka Raya, Kalteng, Selasa (2/7). Herman menambahkan, hal ini bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), guna mendata masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

”

**MEREKA MEMBUAT RUMAH DI ATAS SUNGAI, SEHINGGA INI HARUS DITATA,”**

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, masyarakat yang ada di bantaran sungai itu tidak bisa dipindahkan begitu saja, karena menyangkut hajat hidup mereka. Namun bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN), ini juga menjadi kendala dalam program PTSL, guna menyelesaikan sertifikat dalam desa. Jika ada kendala permintaan masyarakat untuk mendapatkan legalitas dari keberadaan rumahnya, tentu ini harus turut dipikirkan.

“Penataan ini harus berbasiskan hajat hidup masyarakat yang berada di sini. Kalau dipindahkan lokasinya, mereka akan kehilangan pekerjaan. Ini harus melahirkan regulasi yang adaptif terhadap situasi masyarakat. Masih banyak sungai-sungai lainnya di sekitar Kalimantan. Pada sisi lain, masyarakat juga ingin mendapatkan sertifikat atas keberadaan rumah yang mereka tempati,” ungkap politisi dapil Jawa Barat itu.

Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalteng Pelopor, kunjungan Komisi II DPR RI ke Palangka Raya ini menjadi penyemangat baru bagi BPN dalam pelaksanaan PTSL di daerah. “Dengan kunjungan Komisi II DPR RI ini, mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan yang kemudian bisa dilahirkan, seperti kasus hunian masyarakat di sepadan Sungai Kahayan ini,” tutur Pelopor. ■ azk/sf

# Pengadaan ASN 2019, Harus Akomodir Usulan Pemerintah Daerah

**W**akil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menjelaskan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2019 harus mengakomodir tentang usulan kebutuhan ASN dari pemerintah daerah. Tak kalah pentingnya pemerintah daerah juga harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip *zero growth*, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar.

"Kami mendapatkan data lapangan, Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah ASN 6.500 sementara *assessment*-nya harus 9.000 ASN. Mereka ada kekurangan, tetapi tidak bisa menambah karena kasus *zero growth*," kata Mardani usai memimpin pertemuan Tim

”

**TAK KALAH PENTINGNYA PEMERINTAH DAERAH JUGA HARUS MEMPERHATIKAN KETERSEDIAAN ANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DENGAN PRINSIP ZERO GROWTH, KECUALI UNTUK PEMENUHAN ASN BIDANG PELAYANAN DASAR.**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Wakil Gubernur Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta beserta jajaran di Kompleks Kepatihan, DI Yogyakarta, Jumat (28/6).

Politisi dapil Jawa Barat VII ini menyampaikan bahwa saat ini Panitia Kerja (Panja) ASN Komisi II DPR RI menghimpun masukan dari berbagai daerah dan pada waktu bersamaan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI juga tengah membahas revisi UU ASN.

"Data honorer Kategori 1 (K-1) Alhamdulillah sudah selesai, dan K-2 masih terus diperbaiki. Sementara terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

(PPP), pemerintah daerah merasa berat karena harus membiayai pengangkatan PPPK. Tetapi secara umum tujuan Panja ASN di Yogyakarta sudah tercapai," kata Mardani.

Selain itu, Mardani menambahkan bahwa Komisi II DPR RI terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagai pemegang kebijakan, terkait formasi dokter spesialis yang sulit terpenuhi karena maksimal umur 35 tahun. "Padahal sulit mencari dokter spesialis yang umur 35 tahun, semua masukan kita kompilasi dengan baik," tutupnya. ■ afr/es



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera memimpin Tim Kunspek Komisi II DPR RI ke Yogyakarta. Foto: Arief/OO

## Penyelenggaraan Pelayanan Publik Harus Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat

**A**nggota Komisi II DPR RI Dwi Ria Latifa mengatakan saat ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terutama pada era globalisasi saat ini, dimana masyarakat dituntut untuk *melek* akan teknologi informasi, sehingga akan mempengaruhi pola pikir dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

Demikian dikatakan Anggota Komisi II DPR RI Dwi Ria Latifa saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan Wakil Wali Kota Padang dan Ombudsman Sumatera Barat di Padang, Sumbar, Selasa (2/7). Dilanjutkan dengan mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Pasar Raya Padang.

Ia menilai kualitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan, dengan pelayanan prima yang cepat dan mudah dijangkau. Selain itu, masyarakat juga perlu dibimbing dalam memanfaatkan teknologi informasi, mengingat keterbatasan pengetahuan akan teknologi menjadi salah satu tantangan dalam menumbuhkan antusias masyarakat terhadap pelayanan publik.

“Mal Pelayanan Publik ini terlihat cukup nyaman dan lengkap, serta tertata rapi. Secara sistem, kelihatannya bagus, tapi tentu ada hal yang perlu kita beri masukan. Berdasarkan kejadian di lapangan, MPP sangat rumit untuk dijangkau oleh masyarakat,” ucap politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Dwi Ria menjelaskan, kesulitan masyarakat untuk menjangkau

sistem yang ditawarkan MPP berdampak pada kurangnya antusias dalam memanfaatkan sistem pelayanan publik, baik secara *offline* maupun *online*. Untuk itu perlu sosialisasi agar masyarakat lebih familiar keberadaan MPP ini.

“Padahal fasilitas lengkap. Ada laporan bahwa masyarakat tidak tahu kalau tempat yang tinggi ini bisa dijangkau dengan kendaraan hingga lantai empat, di atas juga ada tempat parkir,” pungkasnya. ■ dip/es

Anggota Komisi II DPR RI Dwi Ria Latifa. Foto: Dipa/OD



## Penyelidik Jadi Penyidik di KPK Dipertanyakan

**R**otasi pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dipertanyakan. Salah satunya soal penyelidik menjadi penyidik. Untuk mengalihkan penyelidik menjadi penyidik tidak tepat lewat instrumen rotasi pegawai, dibutuhkan proses seleksi ketat,

karena sangat jelas penyidik di KPK berasal dari Polri.

Persoalan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Pimpinan KPK, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/7). Sebelumnya, Pimpinan KPK menyampaikan ada rotasi pegawai di lingkungan KPK yang salah satunya menasar para penyelidik.

Arteria menjelaskan, menjadi penyidik butuh seleksi sendiri. Tidak bisa begitu saja penyelidik diangkat menjadi penyidik. “Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pimpinan KPK menyebut, rotasi itu dilakukan untuk perpindahan pegawai dengan penekanan pada fungsi yang sama. Jadi perpindahan penyelidik menjadi penyidik tidak tepat kalau dilakukan melalui instrumen rotasi,” tegasnya.

Penyelidik, sambung politisi PDI-Perjuangan itu, yang akan dijadikan penyidik berarti instrumennya adalah

alih tugas, bukan rotasi. Menjadi penyidik di KPK ada tingkatan eselon dan besaran gaji yang harus dibayar. Untuk itu, KPK wajib menggelar seleksi untuk merekrut penyidik walau dari internal pegawainya sendiri.

“Tidak bisa seseorang diangkat dari penyelidik menjadi penyidik tanpa seleksi. Untuk mutasi juga harus ada usulan dan seleksi. Bila tidak ada, itu melanggar Peraturan Pimpinan KPK. Hasilnya juga tidak sah. Apalagi definisi penyidik dan penyelidik sudah beda,” urai Arteria, seraya menambahkan, “KPK mengangkat penyidik harus penyidik Polri, bukan yang lain.”

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan, di Undang-Undang KPK jelas bahwa KPK boleh mengangkat penyelidik dan penyidik. Untuk mengangkat penyidik dari pegawai internal KPK, sudah dibuat tatacara pengangkatan yang diatur dalam peraturan KPK dan Peraturan Pimpinan KPK. ■ mh/es

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan. Foto: Gerald/OD



# Swasembada Minyak Kayu Putih Harus Terwujud Tahun 2024

**W**akil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi meminta Pemerintah tidak melakukan impor minyak kayu putih menargetkan menargetkan Indonesia swasembada minyak kayu putih pada tahun 2024. Ia berharap pelaku usaha yang berkaitan dengan minyak kayu putih seperti pabrik kosmetik dan obat-obatan dalam negeri hendaknya selalu menggunakan bahan baku lokal asli Indonesia sendiri.

Demikian diungkapkan Viva usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI dengan Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta, Perum Perhutani, dan jajaran lembaga terkait di Pabrik Sendang Mulyo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Selasa (2/7).

“Banyak sekali produk turunan dari minyak kayu putih, apakah itu untuk obat-obatan, farmasi untuk kosmetik dan parfum. Kami harap para pelaku usaha di Indonesia hendaknya selalu menyerap bahan lokal dalam negeri,” tutur legislator Fraksi PAN DPR RI ini.

Ia menambahkan, minyak kayu putih ke depannya tidak hanya identik sebagai obat, namun juga dapat diidentikan dengan kecantikan. Viva mengungkapkan, hal tersebut selaras dengan keinginan Perhutani untuk mengembangkan potensi minyak kayu putih menuju target swasembada pada tahun 2024 mendatang.

“Itu juga merupakan harapan dari Komisi IV DPR agar pemerintah lebih serius untuk melakukan swasembada minyak kayu putih. Dengan cara

”

**HANYA DENGAN SEKITAR 150 RIBU HEKTAR SAJA, KITA SUDAH BISA SWASEMBADA.**

melakukan pekerjaan secara bersama-sama antara Perum Perhutani, Kementerian LHK, para pelaku usaha dan masyarakat, terutama masyarakat sekitar desa hutan untuk bisa melakukan swasembada minyak kayu putih,” pungkask Viva.

Politisi dapil Jawa Timur X ini juga menyayangkan masih terjadinya impor minyak kayu putih yang dilakukan pemerintah, padahal, potensi

swasembada minyak kayu putih terbuka lebar. Hanya dibutuhkan lahan sekitar 150 ribu hektar, maka sudah bisa memenuhi sebagai syarat swasembada minyak kayu putih.

Di seluruh wilayah di Indonesia terdapat sekitar 2,4 juta hektar lahan pohon kayu putih. Khusus di Gunung Kidul, sendiri terdapat sekitar 10 ribu hektar pohon kayu putih yang dikelola oleh Perhutani.

“Bayangkan di seluruh Indonesia, Perhutani memiliki lahan sekitar 2,4 juta hektar. Hanya dengan sekitar 150 ribu hektar saja, kita sudah bisa swasembada. Satu pabrik di Gunungkidul ini saja ada sekitar 10 ribu hektar pohon minyak kayu putih. Potensi swasembada minyak kayu putih masih terbuka lebar” pungkask Viva.

■ pun/es



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi (kanan). Foto: Puntho/OD

# Komisi IV Dorong Penguatan Hilirisasi Bagi Petani dan Nelayan



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan saat memimpin Tim Kunspek Komisi IV DPR RI mengunjungi UD Putri Laut. Foto: Singgih/OD

**W**akil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong penguatan hilirisasi bagi petani maupun nelayan di Indonesia, yang mana potensi besar tersebut belum dimaksimalkan dengan baik. Ke depan hilirisasi bagi petani dan nelayan harus diperkuat sehingga mampu menguasai industri pangan.

“Kita mendorong agar diperkuat hilirisasi bagi petani maupun nelayan di Indonesia agar dapat menguasai industri pangan, karena itu menjadi jalan yang sangat efektif untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat,” ungkap Daniel mengunjungi Usaha Dagang (UD) Putri Laut, Tambakrejo, Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/7).

Lebih lanjut, Daniel sampaikan bahwa potensi sumber daya alam

Indonesia sangat melimpah dan ia yakin Indonesia dapat menjadi kekuatan pangan dunia jika bahan baku dapat diolah sehingga memiliki nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“UD Putri Laut ini kan merupakan salah satu yang sudah berhasil dan sangat baik. Di Kota Semarang itu ada bandeng, cumi dan produk olahan laut maupun pertanian lainnya yang sudah mampu diolah sendiri, ke depan kita ingin lebih ditingkatkan lagi produksi dan kualitasnya agar mampu memasuki pasar ekspor,” ungkapnya.

Daniel, juga mengingatkan bahwa untuk melakukan ekspor juga tidak mudah, karena harus mampu memenuhi kebutuhan ekspor minimum. Dalam sebulan harus mampu memenuhi target ekspor. “Untuk bisa melakukan ekspor ini, biasanya jumlahnya tinggi, tidak hanya 100-200 kilogram saja. Misalnya,

”

**KITA MENDORONG AGAR DIPERKUATNYA HILIRISASI BAGI PETANI MAUPUN NELAYAN DI INDONESIA AGAR DAPAT MENGUASAI INDUSTRI PANGAN**

dalam sebulan harus bisa memenuhi permintaan lima *container* dan sifatnya *continue*,” ujar Daniel.

Politisi PKB ini berharap ke depan pemerintah lebih fokus dan meyakini hilirisasi untuk membangun industri pangan lima tahun ke depan, tentu dengan membangun sumber daya manusia sekaligus. “Kita juga mendorong agar pemerintah *men-support* industri pangan baik dalam segi pendanaan, peralatan serta kebutuhan lainnya yang mampu meningkatkan nilai produksi, termasuk juga di Kota Semarang, sehingga target ekspor pada 2020 mendatang bisa terwujud,” ujarnya.

Sementara itu, pemilik UD Putri Laut Suhartono menyampaikan bahwa peralatan yang dimilikinya belum memadai pemenuhan kebutuhan ekspor. Ia berharap dukungan atau bantuan dari pemerintah untuk memfasilitasi usahanya dan rekan-rekannya.

Sebagaimana diketahui bahwa UD Putri Laut merupakan salah satu UPI (Unit Pengolahan Ikan) skala kecil menengah sejak 2002. Dalam proses pemasakan Bandeng Presto, UD Putri Laut menggunakan Panci *Low Temperature High Pressure Cooker* (LTHPC) yang mampu memuat 50 kilogram Bandeng dalam sekali masak. ■ skr/es

# Komisi IV Apresiasi Program SERASI di Banyuasin

**W**akil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena mengapresiasi program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) yang diterapkan di Desa Talang Sari, Kec. Tanjung Lago, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dimana program Serasi mampu meningkatkan produksi Padi hingga tiga kali lipat.

“Kami mengapresiasi sekaligus mendukung penuh program SERASI yang dibentuk oleh Kementerian Pertanian di tiga Provinsi, salah satunya Sumatera selatan tepatnya di Desa Talang Sari, Tanjung Lago ini,” ungkap Michael saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI ke Desa Talang Sari, Kec. Tanjung Lago, Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (2/7).

Ditambahkan Michael, program yang mengoptimalkan lahan rawa ini mampu meningkatkan hasil panen padi. Jika satu hektar lahan biasanya



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Michael Wattimena saat mengunjungi Desa Talang Sari. Foto: Ayu/OD



**JIKA SATU HEKTAR LAHAN BIASANYA MENGHASILKAN 2 TON PADI, DENGAN DITERAPKANNYA PROGRAM SERASI INI HASIL PANEN BISA MENCAPAI 5-6 TON PADI PER HEKTARNYA.**

menghasilkan 2 ton padi, dengan diterapkannya program SERASI ini hasil panen bisa mencapai 5-6 ton padi per hektarnya. “Hal ini tentu sangat bagus dan positif, bagi keberlangsungan pangan kita,” ucapnya.

Pada kesempatan itu Tim Kunspek Komisi IV DPR RI juga menerima aspirasi dari para petani yang tergabung dalam beberapa kelompok tani (Poktan). Salah satunya berupa permintaan tambahan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan). Pasalnya alat mesin pertanian selama ini dinilai masih kurang memadai untuk mengelola lahan rawa yang jumlahnya ribuan hektar.

Menanggapi hal tersebut, Michael meminta agar Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP)

Kementerian Pertanian (Kementan) segera merespon dan menindaklanjuti aspirasi dari petani Desa Talang Sari.

Dalam kesempatan itu pula, Dirjen PSP Kementan Sarwo Edhy mengatakan bahwa SERASI merupakan program andalan pemerintah untuk mengoptimalkan lahan rawa di Indonesia ini. “Pemerintah juga menyertakan pemberian bantuan SAPRODI (Sarana Produksi Padi) termasuk benih unggul dan pupuk, juga alsintan,” kata Sarwo Edhy.

Terkait permintaan petani yang ingin menginginkan penambahan bantuan alsintan, Sarwo Edhy berjanji akan memberikannya, namun tentunya disesuaikan dengan luas atau area lahan yang ada. ■ ayu/es

## Maskapai Berbiaya Murah Belum Diberdayakan

**M**askapai penerbangan berbiaya murah (*low-cost carrier*) selama ini belum diberdayakan Pemerintah Indonesia. Padahal keberadaannya sangat strategis ketika maskapai yang *economy full service* menaikkan harga tiketnya. Tiket pesawat bisa mahal, karena komponen pesawat dan fasilitas yang diberikannya memang mahal. Di sinilah maskapai berbiaya murah jadi pilihan masyarakat.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyampaikan hal ini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7). Sementara temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahwa ada kartel tiket pesawat, tidak sepenuhnya dibenarkan oleh Bambang. Sebelumnya KPPU menemukan sumber masalah melonjaknya tiket pesawat, yaitu salah satunya temuan Dirut Garuda Indonesia yang merangkap

sebagai Komisaris Utama Sriwijaya Air.

“Yang kita persoalkan harusnya tarif maskapai *low-cost carrier*. Ketika KPPU masuk selama enam bulan, tidak menemukan apa pun. Dan baru terakhir ini menemukan jabatan rangkap Dirut Garuda jadi komisaris utama Sriwijaya Air. Walau ada jabatan rangkap, kan masih ada kompetitor lain, yaitu Lion Air. Apakah benar ada indikasi kartel. Kalau Dirut Garuda jadi komisaris di anak perusahaannya memang wajar,” jelas politisi Partai Gerindra ini.

Menurutnya, di luar negeri ada bandara khusus bagi perusahaan penerbangan berbiaya murah. Dari mulai *landing fee*, *airport tax*, *apron fee*, dan fasilitas lainnya diberikan tarif murah. Inilah alternatif penerbangan yang bisa diakses masyarakat bila tiket pesawat lainnya mahal. Sayangnya, perlakuan seperti itu tidak ada di Indonesia. Semua penerbangan

diberikan perlakuan sama. Inilah yang menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi.

Ekonomi berbiaya tinggi juga terjadi ketika lalu lintas di udara dan lalu lintas di bandara begitu padat. Bahkan, di bandara-bandara besar seperti Medan, Denpasar, Jakarta, pesawat yang ingin mendarat harus berputar-putar dulu di udara menunggu antrian. Ini memboroskan bahan bakar. ■ mh/es



Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Foto: Alw/Man

## PKH Harus Tepat Sasaran

**K**etua Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengingatkan agar Program Keluarga Harapan (PKH) didistribusikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga apa yang dicita-citakan melalui PKH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. PKH ini merupakan program

Kementerian Sosial yang menurut Ali Taher cukup efektif menekan angka kemiskinan, asalkan didukung dengan integritas pendamping yang bagus dan data yang akurat.

“Penerima PKH ini harus tepat sasaran, karena itu pendamping harus mendata sesuai dengan apa yang dilihat, dan jangan sampai mereka menyalahgunakan kekurangan masyarakat yang tidak memahami aspek pendataan, termasuk menggunakan kartu ATM penerima manfaat untuk kepentingan pribadi,” ujar Ali Taher saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI mengunjungi Dinas Sosial Provinsi Aceh, di Banda Aceh, Selasa, (2/7).

Politisi PAN ini menjelaskan bahwa kunjungan Komisi VIII ini dikategorikan sebagai kunjungan dengan spesifik dalam rangka melihat perjalanan PKH. Komisi VIII ingin melihat dari aspek pengawasan, dimana setelah DPR RI menganggarkan anggaran PKH setiap tahun, dan dana untuk PKH dari tahun ke tahun terus meningkat, baik itu jumlah, program maupun anggarannya.

“Tahun ini saja lebih dari Rp 35 triliun anggaran dikururkan untuk PKH, dan itu memerlukan kepastian bahwa program ini sampai di masyarakat sesuai *by name*, *by address*. Nah dengan demikian, maka salah satu studi kasusnya yang kita kunjungi adalah di Aceh,” tutur Ali Taher.

Meski digambarkan masyarakat Aceh adalah masyarakat sangat religius, dan kaya, namun temuan di lapangan cukup banyak yang memerlukan PKH. Oleh karena itu intervensi program ini perlu diawasi agar bisa memberikan dampak bagi pelayanan publik yang sesungguhnya. “Karena tanggung jawab negara itu tidak hanya tugas pemerintah, tapi juga DPR dan masyarakat secara luas,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri mengatakan, PKH bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu, yang pada waktunya akan mampu. Seperti keluarga penerima manfaat PKH di Aceh sudah banyak yang sudah dikeluarkan dari daftar penerima karena dianggap sudah mampu. ■ hs/es



Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher. Foto: Hsi/OD

# Komisi VII Perintahkan Gakkum KLHK Segel PT. TEL



Tim Kunspek Komisi VII DPR RI bersama Dirjen Gakkum KLHK meninjau proses pengolahan limbah di PT. TEL di Muara Enim, Sumatera Selatan. Foto: Kresno/mr

**K**etua Panitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyegel lokasi pengolahan dan pembuangan limbah PT. Tanjung Enim Lestari (TEL). Penyegehan ini dilakukan karena perusahaan dianggap tidak mampu mengelola limbah secara profesional sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Kita buat penegasan, Dirjen Gakkum kita perintahkan untuk menyegel lokasi ini dan memproses perusahaan secara pidana. Karena menurut saya sudah melanggar aturan undang-undang 32 tahun 2009. Kami ingin lihat nanti, apabila air limbah

itu tidak berubah tapi dia sudah dilakukan proses pembuangan, itu harus diproses,” tegas Nasir saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI bersama Dirjen Gakkum KLHK meninjau proses pengolahan limbah dari PT. TEL di Muara Enim, Sumatra Selatan, Kamis (28/6).

Menurut Nasir direktur perusahaan harus bertanggung jawab tentang proses limbah perusahaan tersebut. Selain melakukan penyegehan terhadap lokasi pengolahan dan pembuangan limbah PT. TEL, ia juga meminta semua peralatan terkait pengolahan limbah PT. TEL harus dibawa keluar jika perusahaan tidak mampu mengelola secara profesional serta memiliki kajian standar perusahaan yang berpengalaman.

Pada kunjungan bulan Maret lalu, Nasir sebenarnya sudah memerintahkan KLHK untuk menyegel *landfill* ini, namun

proses penyegehan itu ternyata tidak ada. “Nanti kami juga akan mempertanyakan kepada Kementerian, proses yang pada waktu kita datang ke sini sebelumnya, ternyata tidak dilakukan penyegehan. Oleh karena itu, kita datang kesini untuk menyaksikan langsung penyegehan, dan kami membuat penegasan kepada Dirjen Gakkum untuk memproses secara hukum sesuai UU Nomor 32 tahun 2009 secara pidana,” ujar Nasir.

Proses penyegehan ini menurut Nasir sudah sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2009. Apabila perusahaan tidak bisa memusnahkan atau mengelola limbah tersebut, perusahaan wajib menyerahkan kepada pihak lain. Namun jika tidak, perusahaan akan dikenakan sanksi pidana padahal mereka sudah diberikan kesempatan untuk memproses pengolahan limbah.

Pengelolaan limbah, tambah Nasir, tentunya harus memiliki kajian dan dinyatakan bahwa proses limbah ini dinyatakan *clear and clean* dan aman bagi lingkungan. “Itu baru barang ini menyatakan *clear* (oleh perusahaan), tapi ternyata kita baru jalan sampai ujung sana saja dengan memakai saringan masker kita aja sendiri sudah *oyong* (pusing),” ujar Nasir.

Nasir menekankan dirinya tidak memandang perusahaan manapun, dan tetap akan menindak tegas perusahaan yang melanggar UU 32 Tahun 2009. Komisi VII DPR RI hanya melakukan fungsi pengawasan dari proses yang dilakukan Ditjen Gakkum KLHK untuk menyelesaikan seluruh regulasi perusahaan-perusahaan yang membuang limbahnya sembarangan dan tidak bertanggung jawab. ■ eno/es

# Pemda Harus Hati-hati Keluarkan Izin Amdal

**P**anitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR menghimbau agar pemerintah daerah berhati-hati dalam mengeluarkan izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Seperti yang terjadi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, masih ditemukan perusahaan yang mendapat penilaian proper merah, yang berarti pengelolaan limbah lingkungan hidup dilakukan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Kita mengimbau kepada perusahaan yang masih mendapatkan proper merah, agar cepat memperbaiki. Karena kalau kerusakan lingkungan ini dibiarkan akan makin sangat berdampak untuk lingkungan, saya harap bisa mendapatkan proper biru jauh lebih baik,” kata Ihwan Datu Adam saat memimpin pertemuan Tim

Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Panja Limbah dan Lingkungan dengan Bupati Morowali beserta jajaran dan sejumlah perusahaan tambang di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Senin (1/7).

Selain itu, terkait adanya dampak limbah industri, Ihwan menyerahkan kepada perusahaan untuk segera menyelesaikan sehingga dampaknya tidak tersebar ke masyarakat. “Kita minta Pemda melakukan pengawasan dan kita di DPR RI melalui Panja Limbah dan Lingkungan akan terus memantau, semoga pemerintah daerah dan perusahaan bisa segera membereskan,” terang politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Legislator dapil Kalimantan Timur ini mengingatkan, agar instansi pertambangan patuh peringatan yang termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Lingkungan Hidup, serta menaati UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu penegakkan hukum harus tegas, baik itu sanksi administrasi maupun tuntutan pidana lingkungan harus dapat memberikan efek jera dalam menurunkan dampak kerusakan lingkungan hidup.

Sementara itu, Bupati Morowali Taslim mengatakan butuh dukungan dari pemerintah pusat terkait pembiayaan peralatan, khususnya untuk membenahi sampah di kawasan industri. Selain itu ia juga berkomentar terkait keberadaan perusahaan tambang yang banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Morowali. “Selama ini perusahaan-perusahaan tambang di Kabupaten Morowali banyak memberikan manfaat, terutama banyak membuka lapangan pekerjaan,” pungkasnya. ■ jk/es



Anggota Komisi VII DPR RI Ihwan Datu Adam saat Kunspek Panja Limbah dan Lingkungan dengan Bupati Morowali di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Senin (1/7). Foto: Jaka/mr

# Guru Madrasah Harus Semakin Berkualitas

**E**ra digital dan Revolusi Industri 4.0 menuntut seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk bersiap menghadapinya.

Tak terkecuali pelajar madrasah, yang harus mempersiapkan diri untuk menghadapi era ini. Guna menunjang kesiapan pelajar madrasah, turut diperlukan guru madrasah yang berkualitas. Guru-guru madrasah minimal harus memiliki standar yang sama dengan guru di kementerian dan lembaga lain, bahkan kemampuannya harus lebih dari itu.

“Zaman sekarang mendidik anak untuk menjadi pintar itu mudah. Tapi mendidik anak untuk menjadi karakter yang baik dan jujur, itu lebih susah. Itu tugas (guru) madrasah,” tegas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII

DPR RI dengan Kepala Sekolah beserta guru dan staf Madrasah Aliyah Negeri (MAN IC) Kota Batam di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (3/7).

Politisi Partai Gerindra itu menekankan, guru madrasah memiliki tantangan tersendiri. Selain harus memiliki kemampuan dalam mendidik pelajar, juga harus menguatkan akhlak atau karakter anak didik. Menurutnya, menjadikan anak yang memiliki akhlak dan karakter yang baik, bukanlah tuntutan agama semata, tapi tuntutan kehidupan masyarakat saat ini. Pendidikan karakter yang diterima pelajar madrasah yang menjadi pembeda dengan sekolah lainnya.

“Ini tantangan. Maka *skill* dan pendidikan karakter guru-gurunya mesti kita tingkatkan. Kita dapat informasi, MAN IC Batam mendapat ranking ke-4 (4 pelajar MAN IC Batam mendapat nilai

100 pada Ujian Nasional 2019, RED), bisa mengalahkan sekolah umum. Saya kira ini awal dan bukti yang bagus. Kita bekerja keras dan cerdas, sehingga kita bisa lebih unggul dibandingkan sekolah umum atau non-agama,” pesan Sodik.

Legislator dapil Jawa Barat I itu menambahkan, selain meninjau sarana dan prasarana MAN, Komisi VIII DPR RI juga ingin mengetahui kondisi di lapangan mengenai program pinjaman Bank Dunia sebesar Rp 3,5 triliun pada tahun 2019 ini untuk mendukung peningkatan mutu madrasah dasar dan menengah di Indonesia. “Kami meninjau ke lokasi, bagaimana kesiapan dan permasalahan di lapangan, termasuk sarana dan prasarananya,” tandas Sodik.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri Abu Sofyan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam Zulkarnain itu, Kepala Sekolah MAN IC Batam Zakiah mengungkapkan sejumlah permasalahan yang dihadapi sekolah yang dipimpinnya. Ia mengungkapkan masih minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Misalnya fasilitas laboratorium, komputer dan perpustakaan yang perlu mendapat perhatian. Sementara untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini tenaga pendidik, Zakiah meminta guru MAN IC Batam diberikan pelatihan, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta studi banding ke daerah lain. Namun ia memastikan, kendati masih minim sarpras, prestasi pelajar MAN IC Batam pun sangat mengagumkan. ■ sf



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Sekolah MAN IC Kota Batam, Kakanwil Kemenag Kepri dan Kakan Kemenag Batam. Foto: Sofyan/OD

# PPDB di Purworejo Hadapi Banyak Masalah



Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto ketika memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR RI ke Purworejo, Jateng. Foto: Chasbi/OD

**T**im Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI menemukan sejumlah permasalahan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Purworejo. Pertama, masalah sarana dan prasarana yang belum seragam. Kedua, tenaga pendidik yang belum distandarkan dan minimnya jalur prestasi. Selain itu, ada pula kendala dari sekolah yang tidak difavoritkan yang minim pendaftar, sedangkan sekolah yang difavoritkan kebanjiran pendaftar.

“Tentunya ini semua menjadi masukan bagi kami dan akan kami rapatkan bersama dengan rekan-rekan yang melakukan kunjungan kerja ke Surabaya dan Kendal, untuk sama-sama memberikan saran terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan harapan agar ke depannya PPDB bisa berjalan dengan baik dan tidak merepotkan pihak

terkait,” kata Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto ketika memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR RI ke Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (28/6).

Sebelumnya, Djoko menjelaskan, tujuan Komisi X DPR RI ke Purworejo untuk mendapatkan data empiris mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PPDB Tahun 2019. Di waktu yang bersamaan, Komisi X DPR RI pun ingin mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mengatasi kendala dan permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan.

“Sebagaimana kita ketahui sejak diimplementasikan kebijakan PPDB tahun 2017, kebijakan tersebut menuai berbagai masalah. Meskipun kebijakan PPDB bertujuan untuk menjamin Penerimaan Peserta Didik Baru nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Namun pada kenyataannya, implementasi

kebijakan PPDB selama tiga tahun terakhir selalu menimbulkan masalah,” kata politisi Demokrat ini.

Perlu diketahui, lanjut Djoko, kebijakan PPDB telah mengalami tiga kali perbaikan, mulai dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017, lalu diubah menjadi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan yang terakhir Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB.

Politisi dapil Jawa Tengah itu menambahkan, revisi Permendikbud terakhir dianggap telah menjawab persoalan yang ada yaitu dengan mengatur tiga jalur proses PPDB, yakni sistem zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Adapun prosentase kuota PPDB yaitu; zonasi (kuota 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen) dan perpindahan orang tua peserta didik (kuota maksimal 5 persen).

Dari tiga sistem tersebut, masih kata Djoko, zonasi masih menjadi kebijakan paling sensitif. Permasalahan seputar zonasi selalu muncul dalam pelaksanaan PPDB pada tahun-tahun sebelumnya dan pada tahun 2019 ini terjadi resistensi yang sangat tinggi ditengah masyarakat, sehingga Pemerintah mengeluarkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

“Dalam Permendikbud terbaru tersebut memberikan pengecualian kepada daerah yang belum dapat melaksanakan PPDB secara optimal dengan memberikan perbedaan komposisi persentase tiga jalur proses PPDB, yaitu: zonasi (paling sedikit 80 persen), prestasi (paling banyak 15 persen), dan perpindahan orang tua peserta didik (kuota maksimal 5 persen),” jelas Djoko. ■ cas/sf

# Komisi X Pantau Pelaksanaan PPDB di Jatim

**K**omisi X DPR RI memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem *online* dan zonasi yang bermasalah di Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, pihaknya juga untuk menjangkir masukan terkait pelaksanaan PPDB sistem *online* dan zonasi.

“Banyak masukan yang disampaikan mengenai kekurangan PPDB sistem zonasi dan *online*. Masukan itu nanti akan dibahas dan disampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan supaya pelaksanaan PPDB ke depan lebih baik,” ujar Hetifah

usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan jajaran terkait di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Kamis (27/6).

Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima pada pertemuan ini, terungkap bahwa pelaksanaan PPDB di Jatim ada beberapa permasalahan, diantaranya tentang persentase berdasarkan zonasi, zonasi prestasi, infrastruktur yang belum merata di daerah zonasi, dan zonasi yang berada di daerah irisan atau perbatasan.

Lebih lanjut Hetifah mengatakan, keluhan itu hadir dari masyarakat, sekolah dan Pemda. Misalnya ada

”

**PELAKSANAAN PPDB SISTEM ZONASI DAN ONLINE INI AKAN DIEVALUASI, SUPAYA TIDAK ADA PERMASALAHAN DAN KE DEPAN SISTEM ZONASI INI LEBIH BAIK.**

sekolah yang kekurangan murid, sementara ada sekolah yang kelebihan murid. Murid juga ada yang merasa dirugikan karena tidak bisa masuk sekolah yang diinginkan, padahal memiliki banyak prestasi.

“Pelaksanaan PPDB sistem zonasi dan *online* ini akan dievaluasi, supaya tidak ada permasalahan dan ke depan sistem zonasi ini lebih baik. Masukan ini akan kami sampaikan pada rapat Komisi bersama Kemendikbud guna penyempurnaan PPDB ke depan,” komitmen legislator dapil Kalimantan Timur itu.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Hudyono mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi pelaksanaan PPDB sistem *online* dan zonasi ini. Misalnya mengenai nilai ijazah supaya menjadi pertimbangan, dan tidak hanya prestasi kejuaraan saja yang digunakan untuk penilaian.

“Hal ini supaya siswa tetap semangat belajar meraih nilai yang tinggi. Kami berharap pertemuan dengan Anggota Komisi X DPR RI ini dapat memberikan solusi dari permasalahan PPDB sistem *online* dan zonasi ini,” harap Hudyono. ■ man/sf



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto: Andri/OD

# PPDB Zonasi Harus Diimbangi Pemerataan Kualitas Pendidikan

**A**nggota Komisi X DPR RI Noor Achmad menyoroti perlunya peningkatan pemerataan kualitas pendidikan antar sekolah-sekolah di masyarakat dalam menyikapi polemik kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sudah berlangsung selama 3 tahun ini. Pasalnya ada kecenderungan untuk sekolah dengan jumlah penduduk sekitar yang padat akan mendapatkan jumlah siswa yang *overload*, namun akan terjadi kekurangan siswa untuk daerah dengan jumlah masyarakat sekitar yang sedikit.

“Beberapa sekolah ada yang kurang murid, tetapi ada juga sekolah yang terlalu banyak murid. Ini juga jadi catatan bersama, barangkali sekolah yang dekat perumahan yang padat itu pasti akan kebanyakan murid karena zonasi, tapi sekolah yang jauh dari perumahan akan kekurangan murid,” ungkapnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis (27/6).

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, begitu juga dengan sekolah yang berada di kota yang umumnya sekolah favorit pada akhirnya hanya diikuti oleh anak-anak kota. Oleh karena itu, jika permasalahan ini yang terjadi, maka harus ada pemerataan kualitas sekolah. Artinya sekolah yang favorit jangan hanya ada di kota tapi perlu ada di desa, terutama di dekat perumahan padat.

“Nanti kita akan bicarakan secara serius, yakni sarana dan prasarana. Artinya

pemerintah pusat perhatian untuk meningkatkan kualitas, sarana dan prasarana pendidikan. Sehingga tidak ada guru yang favorit yang bagus mengajar di sebuah SMA favorit yang hanya diikuti oleh anak-anak di lingkungan kota. Harus ada sarana dan pemerataan guru supaya proses penyidikan berimbang,” ujar Noor Achmad.

Usai berdiskusi dengan *stakeholder* terkait seperti Wakil Bupati Kendal, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, PGRI, sejumlah kepala sekolah negeri dan swasta, Noor Achmad berdiskusi tentang problematika sistem zonasi yang perlu ditinjau ulang. Seperti muncul pertanyaan manakala sistem zonasi diberlakukan apakah itu tidak membuat anak itu jadi apatis dan lemah sehingga tidak belajar karena ada optimisme akan diterima

di sekolah favorit karena sekolahnya dekat dengan rumah.

“Dari diskusi tersebut kemudian mereka mengusulkan agar ada tambahan dari jalur prestasi, karena jalur prestasi ini akan mengakibatkan sebuah kompetisi yang bagus di antara anak-anak tersebut,” ungkap legislator daerah pemilihan Jawa Tengah II itu.

Meski demikian, berdasarkan paparan yang dijelaskan ternyata hingga saat ini tak ada persoalan serius mengenai PPDB di Kabupaten Kendal. Hanya saja kedepannya, distribusi kualitas pendidikan harus segera

diratakan. “Saya apresiasi terhadap apa yang disampaikan teman-teman dari Kabupaten Kendal. Mereka sudah membuat analisa yang cukup bagus,” pungkas Noor Achmad.

■ hs/sf



Anggota Komisi X DPR RI Noor Achmad. Foto: Hendra/OD

# Komisi XI Dorong Penggunaan Dana Pungutan Sawit Untuk Petani Plasma

**W**akil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mendorong Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyalurkan bantuan dana pungutan sawit kepada para petani plasma perkebunan sawit (kelompok/koperasi) dengan porsi dan keberpihakan yang lebih besar.

“Ada beberapa kelompok masyarakat (petani sawit plasma) dan Koperasi yang sudah menerima bantuan untuk replanting dari bantuan BPDPKS. Namun dari sisi jumlah dan porsinya belum maksimal,” ungkap Hafisz usai memimpin pertemuan dengan jajaran BPDPKS, Perwakilan Pemda Riau, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau serta Kelompok Tani Perkebunan Sawit Riau di Pekanbaru, Riau, Jum’at (28/6).

Politisi Partai Amanat Nasional ini menegaskan, bahwa bantuan dari BPDPKS tersebut jangan sampai diterima oleh perkebunan besar milik korporasi perusahaan sawit. “Kalau di sisi korporasi rasanya mereka tidak perlu lagi diberikan *supporting* dana atau pun sosialisasi,” imbuah Hafisz.

Di setiap korporasi kelapa sawit, terdapat 30 sampai 40 persen petani plasma. Ia menanyakan apakah petani-petani plasma ini sudah dibina oleh BPDPKS. Tetapi, kalau hanya korporasi saja yang dibina, maka Hafisz menganggap bahwa ini merupakan sebuah tragedi bagi rakyat, mengingat sasaran utama BPDPKS ini adalah petani swadaya.

“Data yang masuk ke kami, itu masih sedikit sekali BPDPKS yang diberi bantuan *replanting* dari dana

kompensasi sawit. Total jumlah dana pungutan kelapa sawit ini sudah mencapai sekitar Rp 27 triliun dan ini sedang kita dalam untuk apa saja penggunaannya selama ini,” tandas politisi dapil Sumatera Selatan I itu.

Selanjutnya, Hafisz menjelaskan bahwa DPR RI sudah membentuk Panitia Kerja (Panja) Kelapa Sawit untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan dana pungutan kelapa sawit ini. Hanya saja kinerjanya saat ini masih belum efektif dan maksimal karena terbentur tahun politik dan pemilu.

Sementara itu, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Resiko BPDPKS Catur Ariyanto Widodo menjelaskan saat ini agak sulit menyusun proyeksi pungutan, karena pemerintah menghentikan sementara pungutan atas ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.152/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas PMK No.81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Umum Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Menteri Keuangan.

“Dengan PMK ini pungutan ekspor kelapa sawit, CPO dan turunannya saat ini menjadi nol untuk

sementara waktu, karena harga CPO saat ini berada di bawah US\$ 570 per ton,” ungkap Catur. Berdasarkan peraturan tersebut, selama harga CPO di bawah 570 dolar Amerika Serikat (AS) per ton, tarif ditetapkan 0 dolar AS. Namun, jika harga CPO 570 – 619 dolar AS per ton, maka tarif bervariasi dari 5 sampai 25 dolar AS. Bila harga CPO diatas 619 dolar AS per ton, maka tarif bervariasi antara 20 sampai 50 dolar AS. ■ oji/sf



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir. Foto: Oji/OD

# Penerimaan Pajak Harus Optimal

**W**akil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno menekankan optimalisasi

penerimaan negara yang bersumber dari perpajakan harus terus dioptimalkan dari tahun ke tahun. Seperti yang diketahui, penerimaan perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan negara di dalam menjalankan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

“Pada APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) edisi Juni 2019 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyampaikan perkembangan realisasi APBN 2019 sampai dengan 31 Mei 2019, tercatat masih menunjukkan capaian positif dengan pendapatan negara yang mampu tumbuh 6,19 persen dan belanja negara meningkat 9,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” papar Soepriyatno saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR di Kantor Pajak Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Jumat (28/6).

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, Kunspek Komisi XI DPR ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi terkini guna mengetahui gambaran yang lebih jelas terkait pelaksanaan tugas jajaran Kemenkeu di Provinsi Jatim, khususnya di bidang perpajakan. Mengingat pajak merupakan pendapatan negara yang sangat penting di Indonesia.

“Namun seiring dengan naiknya target penerimaan pajak, di beberapa provinsi terlihat adanya penurunan terhadap penerimaan pajak. Ini harus kita cari tahu penyebabnya, sehingga nanti

bisa disampaikan kepada Menkeu bagaimana cara mengatasinya agar target penerimaan pajak dapat terpenuhi,” jelas Soepriyatno.

Terakhir dirinya mengharapkan, agar pungutan pajak dan cukai yang dipungut dari masyarakat mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Jatim. “Saya kira ini penting menjadi masukan kita sehingga nantinya bisa disampaikan lebih lanjut saat rapat kerja dengan Kemenkeu dan Dirjen Pajak,” tutur politisi Jawa Timur II itu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II Lusiani menyatakan penerimaan pajak khususnya di wilayah Jatim II, target penerimaan mengalami peningkatan. Pada 2019 Bea Cukai Jatim II ditargetkan Rp 42,6 triliun, tumbuh sebesar 7,07 persen dari target 2018.

“Peningkatan penerimaan pada tahun 2018 didorong oleh peningkatan produksi hasil tembakau di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim II. Salah satu faktor pendorongnya adalah semakin berkurangnya peredaran rokok ilegal,” jelasnya.

Untuk itu melalui kunspek Komisi XI DPR ke Jatim, dirinya berharap ada bantuan dan dukungan dari DPR terutama dalam bidang keberpihakan melalui aturan perundang-undangan. “Tentunya seperti yang kita tahu Kanwil ini adalah pelaksana dari aturan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan DPR,” imbuhnya.

Kunspek Komisi XI turut diikuti oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan, (F-P. Demokrat) dan sejumlah anggota Komisi XI DPR lain diantaranya, Andreas Eddy Susetyo, Eva Kusuma Sundari, Indah Kurnia, Rai Wirajaya (F-PDIP), Muhammad Misbakhun, Muhammad Nur Purnamasidi, Sarmuji (F-P. Golkar), Sumail Abdullah (F.P. Gerindra), Siti Mufattahah (F.P.

Demokrat) dan Junaidi

Auly (F-PKS). ■ tra/es

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno. Foto: Tiarai/OD



## Sosialisasi Program Peremajaan Kelapa Sawit Belum Efektif

**A**nggota Komisi XI DPR RI Elviana mengatakan Pemerintah telah membantu pembiayaan pada petani sawit dengan menyalurkan dana Rp 25 juta per hektar melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan program peremajaan (*replanting*) perkebunan kelapa sawit. Namun, program ini masih belum efektif dan tersosialisasi dengan baik, terutama bagi kelompok tani di daerah seperti di beberapa daerah di Provinsi Jambi.

“Panja Kelapa Sawit di Komisi XI bekerja untuk mengevaluasi bagaimana program andalan dari BPDPKS yang berasal dari dana pungutan itu terserap dengan baik untuk *replanting* sawit,” ujar Elviana usai pertemuan dengan

BPDPKS, Pemerintah Provinsi Jambi, Perbankan serta Kelompok Petani Sawit, di Jambi, Jumat (28/6).

Dari pertemuan tersebut, Elviana mengatakan kelompok-kelompok petani sawit yang berbentuk Koperasi Unit Desa (KUD) di Jambi belum memahami adanya dana hibah yang disalurkan melalui BPDPKS sebesar Rp 25 juta per hektar. Sehingga banyak petani yang terjerat dengan penawaran-penawaran dari perusahaan besar, adapula yang pinjam dana ke bank.

“Sebenarnya kalau mereka (petani) paham, itu Rp 25 juta bukan pinjaman, tapi hibah, dana free atau dana *lose* yang diberikan oleh BPDPKS kepada kelompok tani yang sudah memenuhi syarat,” tambah legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.



Anggota Komisi XI DPR RI Elviana (kanan). Foto: Erman/HR

Ia mengakui masih ada miskomunikasi antara BPDPKS dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo, dimana dana hibah melalui BPDPKS di Kabupaten Tebo serapannya masih nol. Menurut pengakuan BPDPKS laporan verifikasi belum disampaikan, sedangkan menurut Pemda Tebo pihak BPDPKS selalu mengulur waktu.

Selanjutnya, sebagai politisi dapil Jambi, Elviana akan mengagendakan sosialisasi bersama BPDPKS agar serapan program *replanting* perkebunan kelapa sawit untuk Provinsi Jambi berjalan maksimal. ■ es

## Mekanisme Serap Aspirasi Dapil pada TKDD Disepakati

**W**akil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Teuku Riefky Harsya mengapresiasi tanggapan yang disampaikan oleh Koordinator Panja Pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Dimana, Pemerintah sependapat untuk memperhatikan dan mendukung adanya mekanisme yang bisa menyerap aspirasi daerah pemilihan Anggota DPR RI dalam konteks APBN.

Hal tersebut diungkapkan Riefky saat rapat lanjutan Banggar DPR RI dengan Panja Pemerintah membahas kebijakan Transfer ke Daerah Dana Desa (TKDD) dalam RAPBN TA 2020 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7). Pada rapat sebelumnya, Banggar telah menerima paparan tentang data pendukung kebijakan TKDD dan mengajukan agar pembahasan TKDD selanjutnya sesuai dengan aspirasi dapil Anggota DPR RI.

“Pada prinsipnya, rekan-rekan di Kemenkeu tentu lebih memahami pengelolaan dan mekanisme anggaran yang transparan, terbuka, *clean, clear* dan *good governance*. Soal besaran dan bagaimana itu dijadikan prioritas tentu pemerintah yang lebih paham,” jelas politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Hal yang paling penting, menurut Riefky adalah diberikannya ruang kepada aspirasi Anggota DPR RI. “Karena sumpah jabatan kita kepada dapil, sehingga mekanisme yang memayungi itu perlu ada. Sumpahnya ada, konstituennya ada, mekanismenya yang tak pernah ada,” tambah Riefky.

Selanjutnya, rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar Jazilul Fawaid menyepakati akan adanya pembicaraan lebih lanjut terkait teknis, termasuk pembentukan tim perumus, setelah penyampaian laporan nota keuangan disampaikan oleh

pemerintah, atau dalam hal ini Presiden, pada Agustus mendatang.

“Paling tidak setelah pembahasan RAPBN, kita bisa sama-sama merumuskan kebijakan yang pas, kebijakannya bisa kita sepakati, teknis pembahasannya secara detil akan kita bahas setelah nota keuangan,” tutup legislator PKB itu. ■ alw/es



Wakil Ketua Banggar DPR RI Teuku Riefky Harsya. Foto: Jaka/HR

# BAKN Dorong Evaluasi Tata Kelola Dana Desa



Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo dan Wakil Ketua BAKN DPR RI Willgo Zainar. Foto: Erman/HR

**B**adan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI meminta pemerintah segera mengevaluasi tata kelola Dana Desa dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Mengingat, adanya tren peningkatan Dana Desa setiap tahun, namun tata kelola, pembinaan serta pengawasan terkait Dana Desa masih bermasalah.

Demikian mengemuka dalam diskusi Forum Legislasi bertema “Sinergi Laporan DPR dan Telaah BPK soal Dana Desa dan LKPP 2014-2018?” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6). Hadir sebagai narasumber, Ketua BAKN Andreas Eddy Susetyo, Wakil Ketua BAKN Willgo Zainar, serta Anggota BAKN Achmad Hatari, Sartono Hutomo dan Junaidi Auly.

Andreas mengungkapkan, selama tahun 2015-2019, Dana Desa telah direalisasikan sebesar Rp 256,9 triliun dan mengalami tren peningkatan. Namun, masih ditemukan sejumlah permasalahan terkait pengawasan Dana

Desa. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018, BPK menemukan belum adanya sistem pengawasan atas pengelolaan Dana Desa.

Diantaranya, Kemendagri belum merancang sistem pengawasan pengelolaan Dana Desa, belum adanya sistem aplikasi untuk monitoring pengelolaan Dana Desa, belum ditetapkannya standar Akuntansi Pemerintah Desa. Belum lagi, perencanaan tidak mempertimbangkan perencanaan pembangunan desa dan prioritas penggunaan Dana Desa, dan BUMDes belum dapat memberi kontribusi signifikan bagi perekonomian desa.

Andreas juga mempermasalahkan ketidakandalan data Dana Desa, akibat dualisme indeks pembangunan desa yaitu Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Pembangunan Desa (IPM). Menyikapi permasalahan itu, BAKN menyarankan kepada Pemerintah untuk mengoptimalkan perannya melalui Kemendagri, Kementerian Desa

PDPT, dan Kementerian Keuangan dalam membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa di tingkat Pemerintah.

Selain itu, masih kata politisi F-PDI Perjuangan ini, untuk penguatan sinergitas dan sinkronisasi regulasi, BAKN mendorong ditetapkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kemendagri, Kementerian Keuangan, Bappenas serta Kementerian Desa dan PDPT.

Sementara itu, Anggota BAKN Achmad Hatari menuturkan Dana Desa menjadi isu yang mengemuka saat ini. Karenanya, pemerintah segera melakukan evaluasi sehingga Dana Desa bisa menjadi *value of money*. “Jadi perlu dikritisi apakah efektif, efisien dan ekonomis. Tiga ‘E’ inilah yang pemerintah harus terus lakukan konsolidasi,” jelas politisi F-NasDem ini.

Wakil Ketua BAKN Willgo Zainar berharap Pemerintah lebih mengedepankan unsur pembinaan dan pengawasan Dana Desa, ketimbang unsur penindakan. Adapun, MoU antara Kementerian yang menaungi Dana Desa diharapkan ada kesamaan pemahaman. “Artinya, tidak serta merta setiap ada kasus harus dilanjutkan dalam proses hukum,” paparnya.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, jika memang ada peluang untuk melakukan perbaikan administrasi, maka dibuka. Karena tidak sedikit Kepala Desa yang menjadi khawatir tersandung persoalan hukum dalam menggunakan Dana Desa. “Bahkan, ada sebagian Kades yang berpikir lebih baik tidak ada Dana Desa. Namun, karena Dana Desa merupakan amanah UU Desa sehingga harus tetap dilaksanakan. Cuma memang intensitas pembinaan Kades ini yang harus dilakukan,” tandasnya. ■ ann/sf

# Pansus RUU Pertembakauan Himpun Informasi Peredaran Pita Cukai Palsu

**P**anitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Pertembakauan menghimpun informasi dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, Perum Peruri, dan PT. Pura Group sebagai salah satu konsorsium pembuat pita cukai rokok, terkait masih adanya pemalsuan cukai rokok yang mempengaruhi penerimaan negara.

“Banyak industri mengeluh karena peredaran pita cukai palsu. Ini tentu berpengaruh pada penerimaan negara. Kita ketahui, industri rokok menjadi penyumbang devisa negara terbesar keempat,” ungkap Ketua Pansus RUU Pertembakauan Firman Soebagyo saat

memimpin Tim Kunker Pansus RUU Pertembakauan mengunjungi PT. Pura Group, salah satu konsorsium pembuat pita cukai rokok, di Kudus, Jawa Tengah, Kamis (27/6).

Ditambahkannya, selama ini industri rokok menjadi telah menyumbang pendapatan negara hingga Rp 150 triliun. Itu salah satunya digunakan untuk membayar BPJS Kesehatan dan sebagainya. Bahkan bendera merah putih “bisa” berkibar di dunia internasional, salah satunya lewat industri rokok yang menjadi sponsor *event-event* olahraga bulu tangkis.

“Meningkat sangat pentingnya

industri rokok atau industri pertembakauan ini, negara wajib melindungi komoditas ini. Salah satunya lewat penyempurnaan regulasi atau undang-undang ini,” tambah politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Pada kesempatan itu, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Ditjen Bea dan Cukai Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan, saat ini pemalsuan pita cukai rokok sudah dapat ditekan hingga 7 persen. Pihaknya akan terus berusaha untuk terus meningkatkan pengawasan dan pemberantasan peredaran pita cukai ilegal hingga 2 persen, bahkan menghilangkan peredaran pita cukai palsu di masyarakat. ■ **ayu/sf**



Pansus RUU Pertembakauan menyerap aspirasi ke PT. Pura Group. Foto: Ayu/HR

# Fasilitas RS Kasih Ibu Bali Cukup Memadai



Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti beserta Anggota BURT meninjau fasilitas RS Kasih Ibu Bali. Foto: Ekai/HR

**T**im Kunjungan Kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) menilai fasilitas dan kesiapan Rumah Sakit (RS) Kasih Ibu, Denpasar, Bali, cukup bagus dan memadai. Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti mengatakan, dengan berbagai fasilitas yang dimiliki, RS Kasih Ibu dirasa cukup menjadi rujukan bagi peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama), dalam hal ini Anggota DPR RI beserta keluarganya.

“Rumah sakit ini bisa menjadi rujukan yang memadai. Ruangan, peralatan, jumlah dokter yang lebih dari seratus, selalu siap. Jika Denpasar banyak turis, dan ada pasien dari lokal, maka yang diprioritaskan adalah orang Indonesia. Ini adalah salah satu rumah sakit yang direkomendasikan dari kita juga untuk pejabat negara dan masyarakat,” kata

Novita saat pertemuan Tim Kunker BURT DPR RI dengan Direktur RS Kasih Ibu Denpasar beserta jajarannya, di Bali, Selasa (25/6).

Politisi Partai Gerindra itu dalam sambutannya mengatakan, dalam pelaksanaan program Jamkestama ini, ada masukan dari Anggota DPR RI terkait pelayanan yang diberikan RS *provider* PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), sebagai operator Jamkestama. Salah satu kasus yang sering terjadi, Anggota DPR RI mendapat pelayanan yang kurang memadai. Permasalahan lainnya, beberapa RS *provider* belum memiliki sarana untuk melaksanakan pelayanan berstandar VVIP.

Dari hasil peninjauan, Anggota BURT DPR RI Ansory Siregar menilai RS Kasih Ibu sudah cukup besar, dengan adanya 27 sub spesialisasi

dan sudah bekerjasama dengan hampir 200 asuransi. Namun ia mempertanyakan pelayanan kepada masyarakat, dengan adanya kewajiban RS untuk menerima pasien yang menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Termasuk pelayanan kepada warga lokal dan wisatawan yang berkunjung ke Bali.

Sementara itu, Direktur RS Kasih Ibu Bali I Wayan Kesumadana mengatakan, RS yang dipimpinnya menyediakan sarana dan prasarana yang canggih. “Kami punya dokter spesialis, dokter bedah, kemudian spesialis penyakit dalam. Ada 104 dokter spesialis. Kemudian karyawan kami ada 328 orang. Fasilitas yang kami miliki ada UGD, ruang bersalin, poliklinik, apotek, ICU, ruangan bayi, dan kamar operasi dengan fasilitas yang canggih,” papar Wayan. ■ hr/sf



Pimpinan DPR RI menerima laporan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik (F-PD) dan Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman M. Fachri RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7). Foto: Kresno, Andri/Sf



Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra (F-NasDem) dan Anggota Komisi I DPR RI Sukanta (PKS) menjadi pembicara dalam Forum Legislasi bertema 'Keamanan Privasi dalam RUU Perlindungan Data Pribadi' di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7). Foto: Geraldi/OD



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar didampingi pejabat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI membuka Pelatihan Dasar bagi 125 CPNS Setjen dan BK DPR RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (28/6). Foto: Grace/SF

